

TESIS

**DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM KABINET GEMUK
KEMENTERIAN DI INDONESIA**



Oleh:

MUHAMMAD RIDHA RAMADHAN

NIM: 2320215310068

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM KABINET GEMUK
KEMENTERIAN DI INDONESIA**

Tesis

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh:

MUHAMMAD RIDHA RAMADHAN

NIM: 2320215310068


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : Dinamika Politik Hukum Dalam “Kabinet Gemuk” Kementerian Di
Indonesia
Nama : Muhammad Ridha Ramadhan
Matrikulasi : 2320215310068

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002

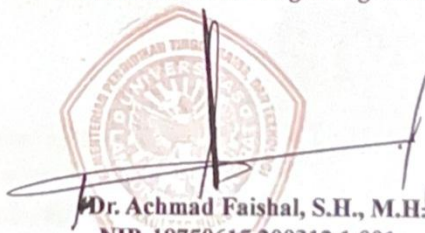
Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing



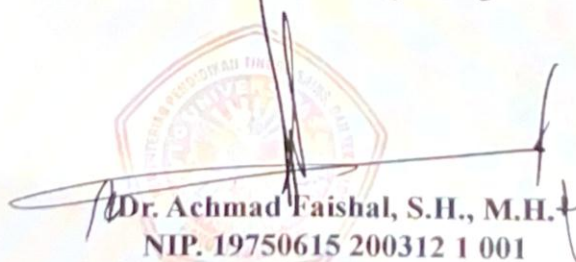
Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

MOTTO/PERSEMBAHAN

وما اللذة إلا بعد التعب

wa maa ladzatu Illaa ba'dat ta'bi

“Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan”

Tiada lembar yang paling indah dalam naskah tesis ini kecuali lembar persembahan

Dengan segala kerendaban hati dan segenap rasa yukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, pemikiran sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Alm. Ayahanda tercinta, terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, dan keteladanan yang senantiasa menjadi penopang dalam setiap langkah perjuangan ini.
2. Ibunda tersayang, yang tak pernah lelah menyemangati, mendoakan, dan mendampingi dengan cinta serta ketulusan yang tiada tara.
3. Kakakku dan Adikku tercinta, terima kasih atas semangat, perhatian, dan dukungan yang telah menjadi sumber kekuatan di sepanjang perjalanan ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridha Ramadhan

NIM : 2320215310068

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Dinamika Politik Hukum Dalam Kabinet Gemuk
Kementerian Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan


091B3AMX094906275
Muhammad Ridha Ramadhan

RAMADHAN, MUHAMMAD RIDHA. 2025, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM KABINET GEMUK KEMENTERIAN DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

RINGKASAN

Penelitian berjudul "*Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia*" yang dilakukan di Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip *good governance*, serta menilai urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip *good governance* seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian cenderung memberikan ruang interpretasi yang luas, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Meskipun prinsip *good governance* mengutamakan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, frasa ini sering kali tidak cukup spesifik untuk memastikan bahwa pembentukan kementerian baru benar-benar mendukung tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa pengaturan jumlah kementerian yang bersifat fleksibel ini dapat lebih dipengaruhi oleh kebutuhan politik jangka pendek, yang berisiko mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Penelitian ini menyarankan bahwa pengaturan jumlah kementerian memang perlu diatur dengan cara yang lebih konkret dan eksplisit. Ketidakjelasan dalam norma pengaturan jumlah kementerian yang ada saat ini memungkinkan interpretasi yang bervariasi, yang dapat berdampak pada tidak konsistennya implementasi kebijakan

pemerintahan. Dengan pengaturan yang lebih jelas, pengawasan terhadap pembentukan kementerian baru dapat lebih terstruktur, dan hal ini akan lebih mendukung prinsip-prinsip good governance, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi negara.

RAMADHAN, MUHAMMAD RIDHA. 2025, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM KABINET GEMUK KEMENTERIAN DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

ABSTRAK

Kata Kunci: Dinamika Politik Hukum, Kabinet Gemuk, Kementerian, Good Governance, Pengaturan Jumlah Kementerian, Sistem Hukum Indonesia.

Penelitian ini berjudul "Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia", yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip good governance, serta menilai urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah kementerian memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Frasa ini tidak cukup spesifik untuk memastikan pembentukan kementerian baru dapat mendukung prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pengaturan jumlah kementerian lebih konkret dan eksplisit agar dapat mendukung prinsip-prinsip tata kelola negara yang baik, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

RAMADHAN, MUHAMMAD RIDHA. 2025, *Dynamics of Legal Politics within the Overstuffed Cabinet of Indonesian Ministries. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.*

ABSTRACT

Keywords: Political Legal Dynamics, Fat Cabinet, Ministries, Good Governance, Regulation of Ministries, Indonesian Legal System.

This research, entitled "The Dynamics of Legal Politics in Indonesia's Fat Cabinet Ministries", aims to examine the suitability of the phrase "according to needs" in regulating the number of ministries with the principles of good governance, and to assess the urgency of regulating the number of ministries in a more concrete and explicit manner within Indonesia's legal system. This study uses normative legal research methods that are descriptive-analytical, focusing on the constitution, laws, implementing regulations, and relevant court decisions. The researcher also examines legal theory, political law, and the principles of good governance such as efficiency, effectiveness, accountability, and transparency. The findings indicate that the phrase "according to needs" in the regulation of the number of ministries creates broad room for interpretation, leading to ambiguity in its application. The phrase is not specific enough to ensure that the establishment of new ministries supports the principles of good governance. Therefore, this research suggests that the regulation of the number of ministries should be more concrete and explicit to support good governance principles such as efficiency, transparency, and accountability in the state administration.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya serta inayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dihanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari kata khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Dinamika Politik Hukum Dalam Kabinet Gemuk Kementerian Di Indonesia”. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga-Nya. Oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan Rekan-rekan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023.

7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat diutarakan mudah–mudahan segala amal baik semua pihak yang telah membantu di balas oleh Allah SWT, dengan balasan berlipat ganda dan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin.

Banjarmasin, Juli 2025

Penyusun

Muhammad Ridha Ramadhan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
MOTTO/PERSEMBAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	30
BAB II PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH	32
A. Prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan yang baik	32
B. Penerapan prinsip good governance dalam struktur dan kinerja kementerian	46
BAB III PENGATURAN JUMLAH KEMENTERIAN YANG PERLU DIATUR LEWAT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN	61
A. Perumusan pengaturan jumlah kementerian dalam pengaturan perundang-undangan	61
B. Konsep pengaturan jumlah kementerian dalam peraturan perundang-undangan	76
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Asas AUPB (UU No. 30 Tahun 2014)	41
Tabel 3.1 Perbandingan regulasi mekanisme regulasi dan partisipasi publik	70
Tabel 3.2 Jumlah kementerian dalam Undang undang	86